



**BUPATI KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA

NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (RKPD) Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyatakan bahwa RKPD dapat diubah

dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, untuk itu Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan sebagai landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 286 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyatakan bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022 Nomor 01);

22. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022 diubah sebagai berikut :

a. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
 - a. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SOPD;
 - b. Penyusunan Perubahan KUA, PPAS dan Perubahan Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Tujuan penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022 adalah untuk :
 - a. Mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;

- b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. Mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

b. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN BERJALAN DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III RENCANA KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

BAB IV PERUBAHAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH

BABV PERUBAHANRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORIRAS
DAERAH

BAB VI PENUTUP

(2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana terlampir Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

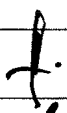


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
pada tanggal, **27** Juni 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,


FIFIAN ADENINGSIMUS

JABATAN	PARAF
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Plt. Kepala BAPPEDA	

Diundangkan di Sanana
pada tanggal, **27** Juni 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,


MUHLIS SOAMOLE

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MARDIA UMASANGADJI, SH
NIP: 19800619200312 2 005